



## **DAFTAR ISI**

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2024 .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Semarang .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Semarang .....	18
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Semarang ..	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA SEMARANG.....	37
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Semarang .....	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA SEMARANG .....	42
BAB V PENUTUP.....	52

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

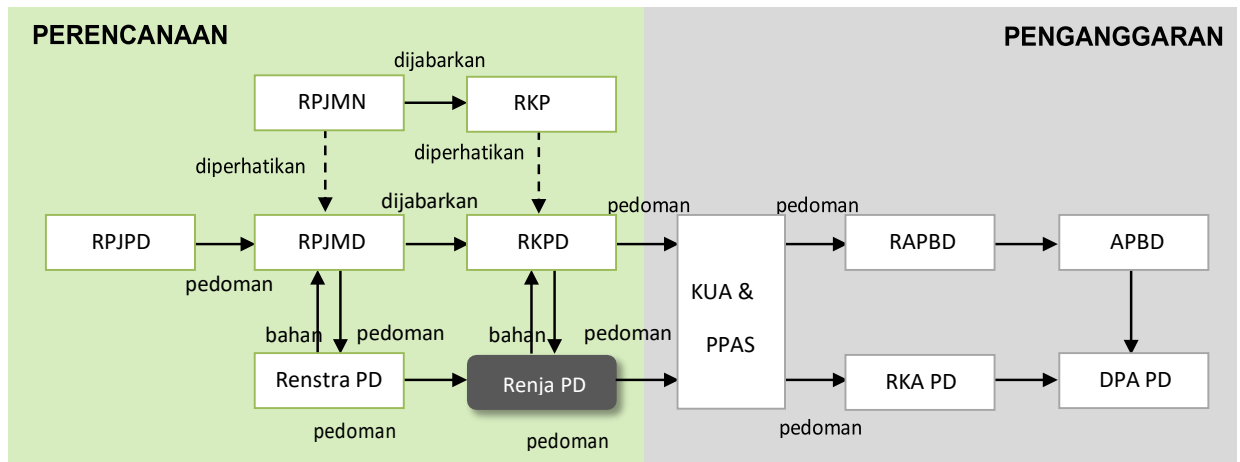
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi

antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



**Gambar 1. 1** Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD  
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2024 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
  - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2024.

## BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2024**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Semarang**

Kualitas penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2022. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 DPMPTSP melaksanakan sebanyak 6 (enam) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp.23.006.116.324,-. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 20.717.788.539,- atau sebesar 90,05%.

**a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 DPMPSTP Kota Semarang**

**Tabel 2. 1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d s/d Triwulan II Tahun 2023	
			Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2.18.01	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3683 penanam modal	3.697 penanam modal	100,38%	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3683 penanam modal	2093 penanam modal	56,84%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	3 buah	3 Buah	100%	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	3 buah	3 buah	100%
2.18.02.2.01.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi	SOP Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan	6 dokumen	4 dokumen	69,40%

	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kemudahan Penanaman Modal			
		Tersedianya Data dan Analisa Perizinan Dalam Rangka Penataan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-	-
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3691 Kegiatan usaha	2586 kegiatan usaha	70,06%
		Terselenggaranya Sertifikasi ISO 9001:2015	3 kegiatan	3 kegiatan	100%				
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	2 dokumen	100%	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	2 dokumen	100%
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RUPMD Kota Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen Potensi Investasi Di Kota Semarang	1 dokumen	1 kegiatan	100%	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	408 investor	675 investor	150,67%	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	492 Investor	395 investor	80,17%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	Jumlah Promosi Investasi	8 kegiatan	4 kegiatan	50%
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	-	-	-	-	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pameran	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	8 dokumen	4 dokumen	50%

2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	95,63%	100,66%	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	61,19%	58,13%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	100%	100%	100%	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	100%	61,19%	58,13%
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan non perizinan Kesra & Lingkungan, Perekonomian dan Pembangunan Sesuai SP	100%	100%	100%	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2400 pelaku usaha	1488 pelaku usaha	62%
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	-	-	-	-	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	750 kegiatan usaha	353 kegiatan usaha	47%
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	-	-	-	-	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	800 kegiatan usaha	376 kegiatan usaha	47%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	-	-	-	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6000 kegiatan usaha	2820 kegiatan usaha	47%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1 (nilai)	1 (nilai)	100%	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	1,6 (nilai)	80,17%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	12,49%	124,90%	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	5,6%	80,17%

	menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	18 perusahaan	18 perusahaan	100%	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	19 pelaku usaha	16 pelaku usaha	80,17%
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	19 kegiatan usaha	16 kegiatan usaha	80,17%
		Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	18 perusahaan	18 perusahaan	100%	-	-	-	-
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	95%	95%	100%	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	96%	50%	52,08%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	100%	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	50%	52,08%
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Secara Elektronik	100%	100%	100%	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	90,91%	90,91%

		- Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	100%	100%	Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	50%	50%
		- Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	80,56%	80,56%
		- Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	75,93%	75,93%
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	9 dokumen	9 dokumen	100%	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	10 dokumen	90,91%
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	0	0%
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	100%

2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 dokumen	2 dokumen	100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	100%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangann SKPD	100%	100%	100%	Persentase Administrasi KeuangannSKPD	100%	80,56%	80,56%
2.18.01.2.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN Yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan	43 orang/bulan	100%
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN Yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	11 laporan	61,11%
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100%	100%	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	50%	50%
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	100 buah	100 buah	100%	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	400 unit	200 unit	50%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	75,93%
2.18.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 jenis	4 jenis	100%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%

2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 jenis	1 jenis	100%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	174 jenis	174 jenis	100%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung	5000 orang	5000 orang	100%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	8 laporan	66,67%
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	2000 kegiatan	2000 kegiatan	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	8 laporan	66,67%
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang Yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 jenis	6 jenis	100%	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13 dokumen	8 dokumen	61,54%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	66,67%	66,67%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8 laporan	66,67%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pembayaran Honor TPHL	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	8 laporan	66,67%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas perorangan dan jabatan dan perizinan kendaraan dinas perorangan dan jabatan	1 unit	1 unit	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100%

2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangandan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	23 unit	23 unit	100%	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	34 unit	100%
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	pemeliharaan mebeleur	100%	100%	100%	Jumlah Mebel yang Dipelihara	250 unit	0	0%
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	100%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	554 unit	25 unit	4,51%

Sumber: DPMPSTSP Kota Semarang, 2023

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2022-2026 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang :
    - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanaka 1 (satu) Urusan, 6 (enam) Program dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program dan 12 (dua belas) Kegiatan dengan 12 (dua belas) Indikator kinerja kegiatan.
    - b) Dari 9 (sembilan) Inidkator kinerja program, terdapat 4 (empat) Indikdator yang melampaui target, 5 (lima) Inidkator memenuhi target.
    - c) Dari rata-rata seluruh capaian tingkat realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2021 adalah 109,89% (seratus sembilan koma delapan puluh sembilan persen) dan termasuk dalam kelompok kriteria penilaian "Sangat Baik".
  - 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 sebagai beirkut:
    - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) Urusan Penanaman Modal, 6 (enam) Program dengan 9 (sembilan) indikator program dan 12 kegiatan dengan 12 (dua belas) indicator kinerja kegiatan.
    - b) Dari 9 (sembilan) indikator kinerja program, terdapat 4 (empat) indikator yang dipekrirakan dapat melampaui target, 5 (lima) Indikator diperkirakan dapat memenuhi target.
    - c) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang bekerjasama dengan seluruh pihak terkait masih berproses mengupayakan 9 (sembilan) indikator kinerja program dapat urusan penanaman modal dapat tercapai dan melampaui target.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 2**  
**Realisasi Keuangan DPMPSTP Kota Semarang Tahun 2022**

URAIAN	TA 2021			TA 2022			TA 2023	TA 2024
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Audit)	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Unaudit)	INDUK	TARGET RKP
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>15.991.655000</b>	<b>15.956.520.000</b>	<b>13.918.381.006</b>	<b>27.368.170.000</b>	<b>23.006.116.324</b>	<b>20.693.918.436</b>	<b>25.887.865.756</b>	<b>19.579.371.173</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>14.998.112.336</b>	<b>15.042.977.336</b>	<b>13.217.316.006</b>	<b>19.358.832.977</b>	<b>15.398.787.897</b>	<b>13.736.398.677</b>	<b>22.205.936.235</b>	<b>17.813.302.542</b>
Belanja Pegawai	10.126.912.000	9.799315.000	<b>9.658.463.025</b>	10.993.426.000	8.171.814.344	<b>7.966.768.140</b>	8.990.021.834	7.993.430.000
Belanja Barang dan Jasa	4.871.200.336	5.243.662.336	<b>3.558.852.981</b>	8.365.406.977	7.226.973.553	<b>5.769.630.537</b>	13.215.914.401	9.819.872.542
Belanja Bunga								
Belanja Subsidi								
<b>Belanja Modal</b>	<b>913.542.664</b>	<b>913.542.664</b>	<b>701.065.000</b>	<b>8.009.337.023</b>	<b>7.607.328.427</b>	<b>6.957.519.759</b>	<b>3.681.929.521</b>	<b>1.766.068.631</b>
Belanja Modal Tanah								
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	913.542.664	913.542.664	701.065.000	7.675.478.920	7.039.828.206	6.500.219.599	3.325.499.661	1.503.493.731
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				0	287.527.839	233.961.500	271.950.000	262.574.900
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				5.798520	0	0	0	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				328.059.583	279.972.382	223.338.660	84.479.860	
Belanja Modal Aset Lainnya								
<b>Belanja Tidak Terduga</b>								
Belanja Tidak Terduga								
<b>Belanja Transfer</b>								
Belanja Bagi Hasil								
Belanja Bantuan Keuangan								
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>15.991.655000</b>	<b>15.956.520.000</b>	<b>13.918.781.006</b>	<b>27.368.170.000</b>	<b>23.006.116.324</b>	<b>20.693.918.436</b>	<b>25.887.865.756</b>	<b>19.579.371.173</b>

Sumber : DPMPSTP Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan pada DPMPSTP Kota Semarang adalah sebesar Rp 23.006.116.324,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 20.693.918.436,- dengan sisa sebesar Rp 2.312.197.888,- (89,94%) dengan uraian berikut:

- a. **Belanja Operasional**, anggaran sebesar Rp.15.398.787.897,- realisasi Rp. 13.736.398.677,- (89,20%) dan sisa anggaran sebesar Rp.1.662.389.220,- (10,80%)
- b. **Belanja Modal**: anggaran sebesar Rp. 7.607.328.427,- Dengan realisasi sebesar Rp. 6.957.519.759,- (91,46%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 649.808.668,- (8,54%).

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPSTP Kota Semarang**

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah melaksanakan urusan bidang Penanaman Modal di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semarang s.d Tahun 2022**

	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2022	2024	2025
Tujuan :							
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	10%	7%	7%	12,49%	7%	7%
Sasaran :							
1. Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi (dalam juta)	24.086.799	25.684.059	27.362.089	24.662.472	27.362.089	29.277.425
2. Terwujudnya Pelayanan Prima	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	95,50%	95,5%	95,63%	95,5%	95,50%
	Nilai AKIP	74	75	77	77,05	77	78

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

DPMPTSP Kota Semarang memiliki tujuan “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi” memiliki 3 (tiga) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu “persentase peningkatan nilai investasi Kota”, telah melampaui target, dimana capaian peningkatan nilai investasi sebesar 12,49 % dari target sebesar 10%. Peningkatan nilai investasi di Kota Semarang ini menjadi salah satu bukti adanya percepatan pemulihan ekonomi yang sangat pesat pasca Pandemi Covid-19. Meningkatnya nilai investasi pasca pandemi Covid-19 ini sekaligus dapat membawa multiplier effect yang dapat memperluas peluang usaha, mendorong produksi barang dan jasa Kota Semarang, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, menurunkan angka ketimpangan ekonomi, serta semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi Covid-19. Sedangkan Sasaran DPMPTSP Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran **Meningkatnya Nilai Investasi** memiliki indikator “Nilai Investasi” telah dapat melampaui target, dimana nilai realisasinya (dalam juta) sebesar 24.662.472 dari target sebesar 24.086.799;

- 2) Sasaran **Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha** memiliki indikator “Persentase izin terbit sesuai SP” telah melampaui target dimana nilai realisasinya adalah 95,63%, dari target sebesar 95%;
- 3) Sasaran **Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah** memiliki indikator “Nilai AKIP” telah dapat melampaui target, dimana nilai realisasinya sebesar 77,05 % dari target sebesar 74 %.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang penyelenggaraan urusan penanaman modal juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 2.4**

**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang  
Sampai Dengan Tahun 2023**

URAIAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI	PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2022	2024	2025
1. Meningkatkan Nilai Investasi	Jumlah nilai investasi (dalam juta)	24.086.799	25.684.059	27.362.089	29.277.425	24.662.472	27.362.089	29.277.425
2. Meningkatkan jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) (investor)	448	492	541	595	675	541	595
3. Meningkatkan persentase investasi	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	10%	7%	7%	7%	12,49	7%	7%
4. Meningkatkan persentase izin terbit sesuai SP (Standar Pelayanan)	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	95,50%	95,50%	95,50%	95,63%	95,50%	95,50%

Sumber: DPMPTSP Kota Semarang, 2023

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di bidang penanaman modal menjadi salah satu penyumbang keberhasilan untuk memperkuat ekonomi masyarakat yang berbasis keunggulan lokal dengan cara membangun iklim usaha yang kondusif di Kota Semarang. Berdasarkan tabel 2.4. diatas, dapat diketahui bahwa dari keempat indikator kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal sampai dengan tahun 2022 seluruh indikator telah melampaui target.

Nilai Investasi Kota Semarang pada tahun 2022 mencapai 24.086.799 (dalam juta), melampaui target nilai investasi tahun 2022 dengan persentase sebesar 124,90%. Selain itu pada tahun 2022 terdapat 675 investor berskala nasional (PMA/PMDN) yang menanamkan modalnya di Kota Semarang telah melebihi target kinerja tahun 2022 yaitu 448 investor. Peningkatan nilai investasi di Kota Semarang ini menjadi salah satu bukti adanya percepatan pemulihan ekonomi yang sangat pesat pasca Pandemi Covid-19. Meningkatnya nilai investasi pasca pandemi Covid-19 ini sekaligus dapat membawa multiplier effect yang dapat memperluas peluang usaha, mendorong produksi barang dan jasa Kota Semarang, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, menurunkan angka ketimpangan ekonomi, serta semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi Covid-19. Beberapa kegiatan unggulan yang dilaksanakan yaitu Semarang Business Forum ke-15 Tahun 2022, Sharing Session DPMPTSP dengan Pelaku Usaha, Temu Bisnis kolaborasi dengan pengusaha di Kota Semarang, Pameran Promosi Potensi Investasi, Kegiatan Kemitraan Usaha Menengah Besar, dan Penyusunan Kajian Strategi Promosi Investasi Kota Semarang.

Pada tahun 2022 pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha berusaha di Kota Semarang berjalan dengan baik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang berhasil mencapai target persentase izin terbit sesuai Standar Pelayanan sebesar 95,63% melebihi target yang ditetapkan yaitu 95%. Prioritas kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program pelayanan penanaman modal yaitu pendampingan OSS RBA dan penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha.

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Semarang**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi urusan bidang penanaman modal diantaranya:

- a. Sumber daya manusia yang kompeten masih terbatas.

- b. Rendahnya penguasaan teknologi oleh pegawai.
- c. Terbatasnya wadah peningkatan kapasitas, kualitas, dan kompetensi pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan diklat/bintek.
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
- e. Belum maksimalnya kegiatan promosi aset Kota Semarang yang dapat ditawarkan kepada investor.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Tingginya tingkat instabilitas kebijakan maupun regulasi yang baku yang mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
- Kejadian luar biasa yang mempengaruhi semua aspek kegiatan masyarakat, baik lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan pelayanan publik serta kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPMPSTP Kota Semarang untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti;

b. Peluang:

- Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti.
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal merupakan salah satu faktor yang akan berpengaruh terhadap pengungkit pembangunan ekonomi daerah.
- Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
- Adanya regulasi yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah,

mudah, transparan, dan pasti, serta peningkatan kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan.

- Adanya dorongan dari semua pemangku kepentingan untuk menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu menjadi institusi yang terpercaya.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Terhambatnya data perkembangan investasi di Kota Semarang, sehingga dapat menyebabkan target promosi investasi di Kota Semarang tidak mencapai target yang ditentukan
- b. Belum Optimalnya proses pelayanan perizinan secara Online, sehingga masih perlu adanya pendampingan perizinan online dan proses tatapmuka dengan pemohon masih ada.
- c. Masih minimnya Informasi dan Edukasi tentang pemahaman pemohon dan petugas pelayanan perizinan melalui OSS secara teknis antar OPD Teknis dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.
- d. Perkembangan Teknologi yang Menyebabkan Perubahan Perilaku Pemohon Izin/Masyarakat.
- e. Belum optimalnya koordinasi antara Pusat, Provinsi, dan kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
- f. Pandemi Covid yang masih berlangsung mengakibatkan proses pelayanan perizinan terhambat.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun ke tiga dari pelaksanaan RPJMD. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 adalah “Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
- e. Prioritas Daerah 5: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

**1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:**

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
- b. Peningkatan nilai investasi;
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
- d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
- e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy);
- f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:

- a. Melaksanakan operasi pasar murah;
- b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
- c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
- d. Gerakan menanam;
- e. Merealisasikan BTT;
- f. Dukungan transportasi dari APBD;
- g. Rapat teknis TPID;
- h. Pemantauan harga dan stok;

- i. Menjaga pasokan;
- j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
- k. Bantuan sosial

**2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem**, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

- 1) Administrasi kependudukan;
- 2) Bantuan sembako;
- 3) Jaminan kesehatan;
- 4) Penanganan stunting & gizi buruk;
- 5) Alat bantu penyandang disabilitas;
- 6) Pelayanan pendidikan;
- 7) Rehab rumah tidak layak huni;
- 8) Sanitasi permukiman;
- 9) Sumber air bersih;
- 10) Pelayanan ketenagakerjaan;
- 11) Pemberdayaan UMKM;
- 12) Pelayanan keluarga berencana;
- 13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

**3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif**, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*;
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas-3, Penanganan Stunting:

- 1) Sensitif
  - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
  - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);

- Penanganan Kawasan Kumuh;
  - Pemberdayaan Ekonomi.
- 2) Spesifik
- Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
  - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
  - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

**4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:**

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
- f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:

- 1) Tanggul Tambaklorok;
- 2) Sungai Plumbon;
- 3) Sungai Penggaron.

**5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:**

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas-5:

- 1) *Smart City*;
- 2) Penguatan Inovasi;
- 3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya DPMPTSP Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas yang pertama, yaitu “**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan**”. Untuk selanjutnya, membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

**Tabel 2. 3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2024**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayann Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024**

No						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
2.18	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>				19.661.985.278	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>				19.579.371.173	
2.18.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi</b>	<b>3700 penanam modal</b>	<b>922.435.427</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi</b>	<b>3700 penanam modal</b>	<b>918.119.127</b>	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	5 buah	<b>572.435.427</b>	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	5 buah	<b>568.119.127</b>	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	371.812.127	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	371.004.027	
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	200.623.300	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	197.115.100	

2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota semarang	2 dokumen	350.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota semarang	2 dokumen	350.000.000	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000	
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)</b>	<b>541 Investor</b>	<b>1.191.500.130</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)</b>	<b>541 Investor</b>	<b>1.187.015.175</b>	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Promosi Investasi	6 kegiatan	1.191.500.130	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Promosi Investasi	6 kegiatan	1.187.015.175	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1.101.500.130	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1.097.015.175	
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	90.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	90.000.000	
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase Izin Terbit Sesuai SP</b>	<b>95,50%</b>	<b>2.503.817.752</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase Izin Terbit Sesuai SP</b>	<b>95,50%</b>	<b>2.430.004.902</b>	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	2.503.817.752	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	2.430.004.902	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan	6 Dokumen	624.994.265	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan	6 Dokumen	611.707.265	

	Fasilitas/Insentif Daerah		Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			Fasilitas/Insentif Daerah		Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	877.579.820	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	828.316.070
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	796.821.041	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	787.931.941
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	750 Kegiatan Usaha	204.422.626	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	750 Kegiatan Usaha	202.049.626
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kota Semarang	<b>Rasio Daya Serap Tenaga Kerja</b>	<b>2 (nilai)</b>	<b>100.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kota Semarang	<b>Rasio Daya Serap Tenaga Kerja</b>	<b>2 (nilai)</b>	<b>100.000.000</b>
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	<b>100.000.000</b>	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	<b>100.000.000</b>
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ;	19 Kegiatan Usaha	100.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ;	19 Kegiatan Usaha	100.000.000

			serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kota Semarang	<b>Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP</b>	<b>97%</b>	<b>718.617.463</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kota Semarang	<b>Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP</b>	<b>97%</b>	<b>718.617.463</b>
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	<b>718.617.463</b>	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	<b>718.617.463</b>
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	718.617.463	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	718.617.463
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Semarang	<b>Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>14.225.614.506</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Semarang	<b>Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>14.225.614.506</b>
		Kota Semarang	<b>Persentase Peningkatan Kemampuan ASN</b>	<b>100%</b>			Kota Semarang	<b>Persentase Peningkatan Kemampuan ASN</b>	<b>100%</b>	
		Kota Semarang	<b>Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD</b>	<b>100%</b>			Kota Semarang	<b>Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD</b>	<b>100%</b>	
			<b>Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD</b>	<b>100%</b>			Kota Semarang	<b>Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD</b>	<b>100%</b>	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	<b>64.172.900</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	<b>64.172.900</b>

2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	30.345.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	30.345.200	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.830.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.830.100	
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.830.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.830.100	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.234.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.234.900	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.830.100	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.830.100	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.830.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.830.100	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	24.272.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	24.272.400	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	<b>7.990.407.000</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	<b>7.990.407.000</b>	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	7.707.530.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	7.707.530.000	
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	277.800.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	277.800.000	

2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.821.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.821.600	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	1.425.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	1.425.300	
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.830.100	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.830.100	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	<b>241.775.400</b>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	<b>241.775.400</b>	
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	65.920.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	65.920.000	
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 unit	175.855.400	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 unit	175.855.400	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	<b>3.083.429.320</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	<b>3.083.429.320</b>	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.246.133.167	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.246.133.167	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	116.602.655	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	116.602.655	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	45.487.472	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	45.487.472	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	48.610.400	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	48.610.400	

2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 laporan	829.900.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 laporan	829.900.000	
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	796.695.626	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	796.695.626	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	<b>1.960.228.976</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	<b>1.960.228.976</b>	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	865.264.976	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	865.264.976	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.094.964.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.094.964.000	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	<b>885.600.910</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	<b>885.600.910</b>	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.950.000	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	443.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	443.600.000	
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	12.107.880	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	12.107.880	

2.18.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 unit	389.943.030	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 unit	389.943.030	
---------------------	--	------------------	--	----------	-------------	--	------------------	--	----------	-------------	--

Berdasarkan table 2.5. di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 19.661.985.278,- (sembilan belas milyar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), akan tetapi yang disetujui sebesar Rp. 19.579.371.173,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2024 memiliki 6 (enam) program yaitu; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Program pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman modal.
3. Adapun jumlah kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebanyak 12 (dua belas) kegiatan dengan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dan akan bertambah 1 (satu) kegiatan saat turunnya anggaran DAK 2024.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2024 dalam rangka pengarusutamaan gender memiliki agenda kegiatan Binbingan Teknis/Workshop/FGD/Sosialisasi yang terakomodir dalam anggaran 4 (empat) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2024 juga mendukung Program Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Semarang.

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG**

**3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 ada 7 (tujuh) Program Prioritas Tahun 2024 sebagai berikut:



**Gambar 3.1.** Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Kinerja Efektivitas Sasaran Pembangunan (Bappenas, 2023)

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”** dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia  
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. **Pembangunan Infrastruktur**  
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi**  
Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi**  
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi**  
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Penguatan daya saing usaha;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”**. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Bila disandingkan dengan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2024 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

*Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2024*

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
<b>Kota Semarang</b>	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
<b>Prov. Jateng</b>	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
<b>Pusat</b>	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator-indikator Kota

Semarang diatas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional terkecuali pada TPT yang perlu ditingkatkan dalam penanganannya.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026, mengacu pada misi ke-2 RPJMD Kota Semarang yaitu “Meningkatnya Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Riset dan Inovasi Berdasarkan Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila”. Tujuan Renstra ini juga merujuk pada tujuan RPJMD Kota Semarang yang ke-3 yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing” yang kemudian diwujudkan sebagai tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026, sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi” yang kemudian juga menjadi tujuan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Semarang Tahun 2024, yaitu :

**“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi ”,**

dengan indikator tujuan **“Persentase Peningkatan Nilai Investasi”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan Nilai Investasi
2. Meningkatkan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tiga Sasaran tersebut memiliki indikator sasaran berikut ini:

1. Nilai investasi
2. Persentase Izin Terbit Sesuai SP
3. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3. 2**

**Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024**

	<b>TUJUAN / SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
TUJUAN :	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	7
SASARAN :	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	(dalam juta)	27.362.089
	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	%	95,5
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	77

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2023

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023/24 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Keserasian dan keterpaduan pembangunan daerah sesuai visi dan misi Kota Semarang yang dijabarkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.
2. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing. Namun secara khusus, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Persentase Peningkatan Nilai Investasi” dan tiga indikator sasaran, antara lain; Nilai Investasi, Persentase Izin Terbit sesuai SP, dan Nilai AKIP.
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 6 (enam) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 (lima) program urusan penanaman modal;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 12 (dua belas) kegiatan, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 6 (enam) kegiatan urusan penanaman modal. Dari 6 (enam) kegiatan urusan penanaman modal tersebut, terdapat 2 (dua) sub kegiatan dari 1 (satu) kegiatan yang merupakan kegiatan pendamping Dana Alokasi Khusus kepada Kota Semarang;
6. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 19.579.371.173,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
  - a. Rp. 14.225.614.506,- (empat belas milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus empat belas ribu lima ratus enam rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
  - b. Rp. 5.353.736.667,- (lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk program dan kegiatan urusan penanaman modal. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 4. 1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan**  
**Prakiraan Maju Tahun 2025 OPD Kota Semarang**  
(Data bisa dicek di Bab V RKPD 2024)

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<b>2.18</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>				<b>19.579.371.173</b>			<b>17.949.291.000</b>	
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi</b>	Kota Semarang	<b>3700 penanam modal</b>	<b>918.119.127</b>	APBD Kota Semarang		<b>3713 penanam modal</b>	3.611.428.000
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	Kota Semarang	5 buah	<b>568.119.127</b>	APBD Kota Semarang		4 buah	1.250.185.917
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang	1 Dokumen	371.004.027	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	932.965.380
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kota Semarang	5 Dokumen	197.115.100	APBD Kota Semarang		3 Dokumen	542.364.997
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota semarang	Kota Semarang	2 dokumen	<b>350.000.000</b>	APBD Kota Semarang		2 dokumen	487.081.083
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	50.000.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	267.081.083
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 Dokumen	300.000.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	220.000.000
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>541 Investor</b>	<b>1.187.015.175</b>	APBD Kota Semarang		<b>595 Investor</b>	624.720.000

2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	Kota Semarang	6 kegiatan	<b>1.187.015.175</b>	APBD Kota Semarang		7 kegiatan	624.720.000
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Semarang	6 Dokumen	1.097.015.175	APBD Kota Semarang		7 Dokumen	624.720.000
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kota Semarang	1 Dokumen	90.000.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	694.251.000
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Izin Terbit Sesuai SP</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>95,50%</b>	<b>2.430.004.902</b>	APBD Kota Semarang		<b>95,50%</b>	1.249.441.000
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	Kota Semarang	100%	<b>2.430.004.902</b>	APBD Kota Semarang		100%	1.249.441.000
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	6 Dokumen	611.707.265	APBD Kota Semarang		6 Dokumen	788.503.000
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	2400 Pelaku Usaha	828.316.070	APBD Kota Semarang		2400 Pelaku Usaha	1.249.441.000
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	800 Pelaku Usaha	787.931.941	APBD Kota Semarang		800 Pelaku Usaha	300.000.000
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kota Semarang	750 Kegiatan Usaha	202.049.626	APBD Kota Semarang		750 Kegiatan Usaha	300.000.000
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rasio Daya Serap Tenaga Kerja</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>2 (nilai)</b>	<b>100.000.000</b>	APBD Kota Semarang		<b>2 (nilai)</b>	485.976.000
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	Kota Semarang	7%	<b>100.000.000</b>	APBD Kota Semarang		7%	

2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kota Semarang	19 Kegiatan Usaha	100.000.000	APBD Kota Semarang		19 Kegiatan Usaha	145.976.000
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP</b>	Kota Semarang	<b>97%</b>	<b>718.617.463</b>	APBD Kota Semarang		<b>99%</b>	624.720.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	Kota Semarang	100%	<b>718.617.463</b>	APBD Kota Semarang		100%	624.720.000
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Semarang	1 dokumen	718.617.463	APBD Kota Semarang		1 dokumen	624.720.000
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD</b>	Kota Semarang	<b>100%</b>	<b>14.225.614.506</b>	APBD Kota Semarang		<b>100%</b>	5.500.000
		<b>Presentase Peningkatan Kemampuan ASN</b>	Kota Semarang	<b>100%</b>		APBD Kota Semarang		<b>100%</b>	35.000.000
		<b>Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD</b>	Kota Semarang	<b>100%</b>		APBD Kota Semarang		<b>100%</b>	11.227.566.472
		<b>Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD</b>	Kota Semarang	<b>100%</b>		APBD Kota Semarang		<b>100%</b>	2.007.772.528
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	Kota Semarang	11 dokumen	<b>64.172.900</b>	APBD Kota Semarang		11 dokumen	5.500.000
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 dokumen	30.345.200	APBD Kota Semarang		3 dokumen	1.000.000
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.830.100	APBD Kota Semarang		1 dokumen	500.000
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.830.100	APBD Kota Semarang		1 dokumen	500.000

2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	2.234.900	APBD Kota Semarang		1 dokumen	500.000
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.830.100	APBD Kota Semarang		1 dokumen	500.000
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	1 laporan	1.830.100	APBD Kota Semarang		1 laporan	500.000
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 laporan	24.272.400	APBD Kota Semarang		3 laporan	2.000.000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%	<b>7.990.407.000</b>	APBD Kota Semarang		100%	11.227.566.472
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	44 orang/bulan	7.707.530.000	APBD Kota Semarang		44 orang/bulan	11.015.466.472
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	1 dokumen	277.800.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	210.000.000
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 laporan	1.821.600	APBD Kota Semarang		1 laporan	700.000
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	18 laporan	1.425.300	APBD Kota Semarang		18 laporan	700.000
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 dokumen	1.830.100	APBD Kota Semarang		1 dokumen	700.000
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	Kota Semarang	100%	<b>241.775.400</b>	APBD Kota Semarang		100%	35.000.000
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	200 unit	65.920.000	APBD Kota Semarang		200 unit	35.000.000
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	100 unit	175.855.400	APBD Kota Semarang		100 unit	1.535.772.528

2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum		100%	<b>3.083.429.320</b>	APBD Kota Semarang		100%	250.000.000
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	1.246.133.167	APBD Kota Semarang		1 paket	60.000.000
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	116.602.655	APBD Kota Semarang		1 paket	125.772.528
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	45.487.472	APBD Kota Semarang		1 paket	140.000.000
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	12 laporan	48.610.400	APBD Kota Semarang		12 laporan	590.000.000
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	12 laporan	829.900.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	370.000.000
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	3 dokumen	796.695.626	APBD Kota Semarang		3 dokumen	85.000.000
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Semarang	100%	<b>1.960.228.976</b>	APBD Kota Semarang		100%	40.000.000
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	865.264.976	APBD Kota Semarang		12 laporan	45.000.000
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	1.094.964.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	387.000.000
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Semarang	100%	<b>885.600.910</b>	APBD Kota Semarang		100%	57.000.000
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	1 Unit	39.950.000	APBD Kota Semarang		1 Unit	240.000.000
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	34 unit	443.600.000	APBD Kota Semarang		34 unit	40.000.000

2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Semarang	150 unit	12.107.880	APBD Kota Semarang		150 unit	50.000.000
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	190 unit	389.943.030	APBD Kota Semarang		190 unit	5.500.000

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 6 (enam) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 (lima) program urusan penanaman modal;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 12 (dua belas) kegiatan, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 6 (enam) kegiatan urusan penanaman modal. Dari 6 (enam) kegiatan urusan penanaman modal tersebut, terdapat 2 (dua) sub kegiatan dari 1 (satu) kegiatan yang merupakan kegiatan pendamping Dana Alokasi Khusus kepada Kota Semarang;
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 19.579.371.173,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
4. Rp. 14.225.614.506,- (empat belas milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus empat belas ribu lima ratus enam rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
5. Rp. 5.353.736.667,- (lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) untuk program dan kegiatan urusan penanaman modal. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2024 dalam rangka pengarusutamaan gender memiliki agenda kegiatan Binbingan Teknis/Workshop/FGD/Sosialisasi yang terakomodir dalam anggaran 4 (empat) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

serta Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2024 juga mendukung Program Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Semarang.

## **BAB V PENUTUP**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### **a. Catatan Penting**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

### **b. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024;

2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024.

**c. Rencana Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaandokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

Semarang, 31 Agustus 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang



Dr. WIDOYONO, MPH